

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Imam Cahyo Laksono**  
NPM : 177310720

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

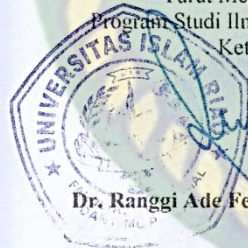
Nama : Imam Cahyo Laksono  
NPM : 177310720  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam  
Pengelolaan Sampah di Kota Dumai

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Turut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Imam Cahyo Laksono  
NPM : 177310720  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam  
Pengelolaan Sampah di Kota Dumai

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Ketua

Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



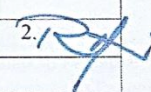
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 28 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 April 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : **Imam Cahyo Laksono**  
NPM : **177310720**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**  
Judul Skripsi : **Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai**

Nilai Ujian : Angka : " 82.2 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si	Ketua	1.
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. PANca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3.

Pekanbaru, 29 April 2021  
Atr. Dekan  
  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



NOMOR : 035/UIR-FS/KPTS/2021  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**imbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

**etapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Imam Cahyo Laksono**  
N P M : **177310720**  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.*

Struktur Tim :

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si               | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos, MA.                 | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 April 2021  
Dekan

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Penyampaian Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imam Cahyo Laksono  
NPM : 177310720  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam  
Pengelolaan Sampah di Kota Dumai

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Ketua



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

An. Tim Penguji  
Sekretaris



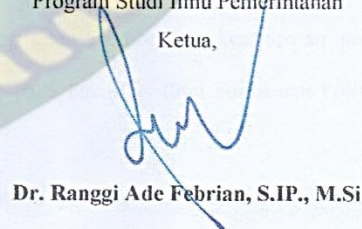
Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I



Indra Saffri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat untuk menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana “strata satu” pada fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Riau. Adapun judul skripsi **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai”**.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkompeten serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam skripsi ini. Ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakulltas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada

penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Ibuk Sylvina Rusadi., S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini terhadap apa yang sudah di beri arahan.
5. Terimakasih buat kedua Orangtua saya yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada habisnya kepada saya baik secara moral maupun materil kepada saya untuk dapat segera menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan saya menjadi lebih luas dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian.
7. Seluruh staf, karyawan/karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi mengenai surat-surat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian naskah usulan penelitian ini.
8. Teman-teman beserta sahabat saya Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebut kan namanya satu-persatu, yang telah



membantu dan memberikan motivasi agar penulis bisa segera menyelesaikan studinya.

9. Terimakasih buat kakak, abang ipar serta ponakan sayang yang memberikan semangat buat saya dalam menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu,

Demikian usulan penelitian ini di tulis dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Penulis mohon kritik dan saran guna menyempurnakan kedepannya. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan, penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Penulis

Imam Cahyo Laksono

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Konsep Operasional .....	40
E. Operasional Variabel .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Tipe penelitian .....	44
B. Lokasi penelitian.....	44
C. Informan penelitian dan Informan .....	44
D. Teknik penentuan.....	45
E. Teknik pengumpulan data.....	45
F. Teknik analisis data .....	46



<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Keadaan Geografis .....	48
	B. Pemerintahan .....	49
	C. Penduduk .....	49
	D. Sosial .....	49
	E. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .....	50
	F. Rincian tugas dan fungsi dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Dumai .....	54
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
	A. Identitas Responden .....	74
	B. Hasil Penelitian Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.....	75
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
	A. Kesimpulan .....	88
	B. Saran .....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
	<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 :	Jumlah Penduduk Kota Dumai Dari Setiap Kecamatan.....	9
Tabel I.2:	Jumlah TPS dan Lingkungan Pelayanan Persampahan Di Kota Dumai. ....	12
Tabel I.3 :	Data Jumlah Armada Pengangkutan Persampahan .....	14
Tabel II.1 :	Peneliti terdahulu terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai. ....	37
Tabel II.2 :	Operasional Variabel.....	42
Tabel III.1:	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah di Kota Dumai.....	48
Tabel V.I :	Identitas Informan .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 : Kerangka pikir peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pengelolaan sampah di kota dumai .....	39
Gambar IV.1 : Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dumai.....	53



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Imam Cahyo Laksono

NPM : 177310720

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 April 2021

Pelaku pernyataan



Imam Cahyo Laksono



# PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DUMAI

## ABSTRAK

OLEH

IMAM CAHYO LAKSONO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai. Tipe penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara survey, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data yang menjadi bahan baku utama untuk mengamati lokasi penelitian. Penelitian berlokasi di jalan Brigjen HR Soebrantas Kota Dumai. Terdapat informan kunci dan informan pada penelitian ini yaitu Kepala Seksi Penanganan Sampah, Ketua Rukun Tetangga dan Petugas Buruh Angkut sampah. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder dikumpulkan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah.

*Kata kunci: Peran, Pengelolaan Sampah.*

**THE ROLE OF ENVIRONMENTAL AND CLEANLINESS AGENCIES IN  
WASTE MANAGEMENT IN THE CITY OF DUMAI**

**ABSTRAK**

**OLEH**

**IMAM CAHYO LAKSONO**

*This study aims to determine the role of the environmental service in waste management in the city of Dumai. This type of research uses a qualitative method by means of a survey, which prioritizes the list of interviews as a data collection tool which is the main raw material for observing the research location. The research is located on jalan Brig. Gen. HR Soebrantas, Dumai City. There are key informants and informants in this study, namely the head of the waste handling section, the head of the neighborhood association (RT), and the garbage transport worker. The three data collection techniques used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and results of field research and secondary data were collected in the form of reports and notes and documents. Based on this observation technique, the researcher assesses and concludes that the role of environmental and hygiene service in waste management.*

*Keywords: role, waste management*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat luas wilayahnya. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan istilah Negara kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari suatu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara di dalam Negara seperti halnya pada Negara federal.

Wilayah Negara kesatuan Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunnya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota Negara. Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di daerah dengan kata lain dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan, Negara telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah Negara tersusun secara vertical dan horizontal.

Dengan adanya ketetapan undang-undang dasar 1945 tersebut maka ditetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “pemerintahan daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “pemerintahan daerah, member ruang bagi daerah sebagai daerah otonomi”. Daerah otonomi selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. (undang-undang Negara republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang pemerintahan daerah).

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sebagaimana yang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 2014.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 9 yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.



- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolute meliputi:

- a) Politik luar negeri
- b) Pertahanan
- c) Keamanan
- d) Yustisi
- e) Moneter dan fiscal; dan
- f) Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat Melaksanakan sendiri dan Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
2. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Social.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Tenaga kerja
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan

- e) Lingkungan hidup
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan olahraga
- n) Statistic
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan.

Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahun. Berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yakni mencapai 60% dari total sampah. Sampah plastik menempati posisi kedua dengan 14% disusul sampah kertas 9% dan karet 5,5%. Sampah lainnya terdiri dari logam, kain, kaca, dan jenis sampah lainnya.

Lingkungan hidup adalah salah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk



membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

Sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan setiap orang baik individu maupun keluarga serta kehidupan masyarakat. Tetapi kerap kali kita dengar banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh proses pengolahan sampah yang tidak benar sehingga sampah perlu ditangani secara maksimal karena bila tidak akan menimbulkan masalah terutama di kota-kota besar bahkan skala besar.

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, maupun di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja ditempat disediakan tanpa apa-apakan lagi. Dari hari-kehari sampah itu kita lihat terus menumpuk dan terjadi bukit sampah yang seperti kita lihat. Sampah yang menumpuk itu, sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain bauknya tidak sedap, sampah sering dihadapi oleh lalat. Dan juga dapat menimbulkan wabah penyakit.

Masalah kebersihan lingkungan saat ini masih menjadi isu sentral oleh karena itu cukup beralasan jika mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak, sebab dapat yang terjadi pada lingkungan yang kurang bersih akan menimbulkan

permasalahan, bukan saja berpengaruh pada kesehatan masyarakat tetapi juga dapat memperburuk keindahan kota.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah padat yang di kelola dengan baik seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, misalkan saja sampah-sampah organik yang ada dijadikan sebagai pupuk kompos, sampah-sampah plastik di daur ulang sehingga sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang tetapi dapat dimanfaatkan bahkan dicari atau ditunggu-tunggu semua orang.

Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di indonesia, setelah kota palangkaraya, dan kota Tidore kepulauan. Kota dumai ini juga dikenal dengan julukan kota pengantin berseri di provinsi riau. Dumai dikukuhkan menjadi kota dumai dengan Undang-undang No. 16 tahun 1999 tanggal 20 april 1999 dimana status dumai sebelumnya adalah kota administratif. Pada awal pembentukannya, kota dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km<sup>2</sup>. Yang kemudian penduduk kota Dumai semakin berkembang dari tahun ke tahun.

**Tabel I . 1 : jumlah penduduk kota dumai dari setiap kecamatan**

No	Kecamatan	Kelurahan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	5.180	4.973	10.153
		Purnama	8.228	8.015	16.243
		Bagan Keladi	3.127	2.931	6.058
		Simpang Tetap Darul Ihsan	5.058	4.937	9.995
			21.593	20.856	42.449
2	Dumai Timur	Teluk Binjai	9.186	8.675	17.861
		Tanjung Palas	5.363	5.100	10.463
		Jaya Mukti	9.766	9,571	19.337
		Buluh Kasap	3.578	3.384	6.962
		Bukit Batrem	6.206	5.684	11.890
		34.099	32.414	66.513	
3	Bukit Kapur	Bukit Nenas	4.103	3.819	7.922
		Bukit Kayu Kapur	7.617	7.018	14.635
		Gurun Panjang	2.585	2.382	4.967
		Bagan Besar	7.667	7,280	14.947
		Kampung Baru	3.589	3.303	6.892
		25.561	23.802	49.363	
4	Sungai sembilan	Lubuk Gaung	5.726	5.325	11.051
		Tanjung Penyembal	4.470	4.175	8.645
		Bangsai Aceh	2.681	2.520	5.201
		Basilam Baru	5.426	4.858	10.284
		Batu Teritip	1.983	1.730	3.713
		20.286	18.608	38.894	
5	Medang kumpai	Teluk Makmur	2.103	1.994	4.097
		Mundam	1.911	1.783	3.694
		Guntung	928	893	1.821
		Pelintung	3.078	2.823	5.901
			8.020	7.493	15.513
6	Dumai Kota	Laksamana	1.911	1.832	3.743
		Rimba Sekampung	7.380	7.287	14.667
		Dumai Kota	3.866	3.772	7.638
		Bintan	3.522	3.321	6.843
		Sukajadi	4.950	4.783	9.733
		21.629	20.995	42.624	
7	Dumai selatan	Ratu Sima	7.186	6.777	13.963
		Bukit Timah	3.955	3.750	7.705
		Mekar Sari	3.180	3.070	6.250
		Bukit Datuk	6.453	6.106	12.559
		Bumi Ayu	5.453	5.287	10.740
		26.227	24.990	51.217	
<b>Jumlah Penduduk Kota Dumai</b>			<b>157.415</b>	<b>149.158</b>	<b>306.573</b>

Sumber : Observasi Mahasiswa .



Organisasi yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan masalah sampah di kota Dumai sesuai dengan peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dan kemudian diturunkan melalui Peraturan Walikota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada pasal 4 menyebutkan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang lingkungan hidup.

Dan lebih khususnya pengelolaan sampah dilakukan pada bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah
- b. Penetapan target pengurangan sampah
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah
- g. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- h. Perumusan kebijakan penanganan sampah
- i. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah**

- j. **Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah**
- k. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- l. **Penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), Tempat Pengelohan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah**
- m. Penyusunan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping
- n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- o. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- p. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- q. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- r. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- s. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- t. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- u. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

- v. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan)
- w. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- x. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- y. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- z. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut 3(tiga)

Tabel I.2.: Jumlah TPS dan Lingkungan Pelayanan Persampahan Di Kota Dumai.

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Sampah yang diangkut (ton)
1	Dumai Kota	6	30
2	Dumai Selatan	3	15
3	Dumai Barat	3	15
4	Dumai Timur	3	15
5	Bukit Kapur	-	0,5

Sumber : Observasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

Berdasarkan pada tabel diatas banyak nya sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari pada musim kemarau, mereka sekali mengangkut sampah mencapai 5 (ton) dengan sekali angkut. Jumlah angkutan sampah yang terbanyak berada di kecamatan Dumai Kota yang mencapai 30 (ton) dengan sekali mereka angkut menggunakan armada dumtruk, dan kecamatan yang tidak ada



TPS nya berada di Kecamatan Bukit Kapur karena mereka mengambilnya dengan cara mendatangi setiap titik/wilayah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dikarenakan wilayahnya cukup jauh untuk di tempuh.

Peneliti memfokuskan TPS di Kecamatan Dumai Kota untuk meneliti karena terdapat jumlah TPS nya sebanyak 6 (TPS) yang ditempatkan tidak strategis dikarenakan TPS nya begitu jauh dari padatnya penduduk sehingga warga membuang sampahnya harus menempuh jarak yang begitu jauh, dengan itu warga banyak membuang sampah sisa makanan ataupun sampah plastik sembarangan yang mengakibatkan selokan menjadi tersumbat dan terjadi banjir pada saat hujan maupun air laut naik.

Peneliti memfokuskan kelanjutan masalah mengenai sampah:

1. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah. Dengan alasan karena supaya sampah itu bisa dibedakan sampah organik dan non organik dari TPS sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) supaya tidak ada lagi penumpukan di TPS.
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah. Dengan alasan karena di Kota Dumai masih kekurangan armada pengangkut sampah yang mengakibatkan sampah di TPS semakin menumpuk
3. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Dengan alasan karena penempatan TPS di masyarakat tidak tepat karena jauh dari masyarakat mengakibatkan warga membuang

sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan tersumbat pada saat hujan deras ataupun buang sampah di TPS yang jauh dari tempat warga.

Tabel I.3 Data Jumlah Armada Pengangkutan Persampahan.

No	Nama Armada	Jumlah Armada
1	Dum truk	19 unit
2	Amroll	6 unit
3	Boldozer	2 unit
4	Kaisar	2 unit
Jumlah		29 Unit

Sumber : Observasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa armada pengangkutan persampahan yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dumai sebanyak 29 unit. Armada yang bertugas untuk angkut sampah dari TPS yaitu Dumtruk sebanyak 19 unit tetapi masih terjadi penumpukan sampah di TPS.

Penanganan sampah yang terjadi di kota dumai belum maksimal meski demikian Pemerintah Kota dumai masih harus bekerja keras mengatasi persoalan sampah diiringi kesadaran masyarakat yang turut berperan menciptakan lingkungan bersih. Untuk itu peneliti menemukan fenomena sebagai berikut

1. Kurang nya koordinasi antara petugas buruh pengangkut sampah dengan warga sekitar TPS terhadap armada pengangkutan sampahnya tiba di TPS tidak tepat waktu sehingga sampah semakin menumpuk di TPS,ada juga petugas buruh dengan pemerintah yang kurang koordinasinya terhadap penyediaan TPS yang organik dan nan organik supaya warga bisa

membuang sampahnya pada tempat yang benar agar bisa diurai/dikelola tempat penampungan akhir (TPA)

2. Kurangnya fasilitas seperti bak sampah (TPS) sehingga warga membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran air dan pencemaran udara yang kurang sehat bagi kesehatan tubuh dan juga kurangnya armada pengangkut sampah yang sedikit apabila terjadi musim kemarau sampah sisa makanan menumpuk di TPS sehingga armada pengangkut sampah pun tidak bisa sekaligus mengangkut sampah itu hingga bersih.
3. Terindikasi bahwa TPS di Kota Dumai penempatannya tidak strategis karena sangat jauh dari permukiman penduduk sehingga warga jadi tidak membuang sampah pada TPS, kalau pada TPA nya pihak Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik dikarenakan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kekurangan dana buat melakukan pengelolaan sampah, mereka hanya melakukan nya dengan cara sampah itu dilakukan penimbunan.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat: **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DUMAI.”**



## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dumai dalam mengatasi permasalahan sampah di kota Dumai?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

- A. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota dumai.
- B. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan sampah di Kota Dumai.

### 2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan serta manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Dari hasil penelitian ilmu pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan sumbang ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada dunia akademik baik ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organ-organ yang terdapat di dalamnya atas pertimbangan wilayah yang lingkungannya sudah tercemar oleh sampah yang berserakan di jalanan yang terdapat di dalam peraturan walikota dalam ilmu pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penulisan karya ilmiah atau penelitian diperlukan konsep pada penelitian ini kemukakan landasan atau pijakan sebagai pendoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam peneliti ini. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut.

##### 1. Teori Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong).

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara



masyaakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Utrech membagi pengertian pemerintahan menjadi tiga (3) bentuk yaitu:

- a. Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah.
- b. Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu Negara.
- c. Pemerintahan dalam arti kepada Negara bersama dengan kabinetnya.

Supriyatno (2009:26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

Dalam Ilmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997;13) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat belangsung secara damai.

- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Brasz mengatakan pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetisi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi dari pada negara di dalam semua perwujudan (mulai dari negaa itu sendiri provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi, perusahaan milik pemerintah) sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik (dalam Syafiie, 2007;35).

Menurut Jo Ann G. Ewalt (2001:10) berpendapat pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan listrik yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian harus bertukar sumber dan bernegosiasi pemahaman bersama tujuan program tujuan utama.

## 2. Teori Ilmu Pemerintahan

Menurut mariun ilmu pemerintahan yaitu menunjuk kepada kegiatan atau fungsi-fungsi Negara. Ilmu pemerintahan dalam arti luas menunjuk kepada segala kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan ilmu pemerintahan dalam arti sempit menunjuk hanya kepada kegiatan eksekutif semata.

Selanjutnya Brasz (dalam Syafie. 2009;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poeljie (dalam Syafie. 2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie. 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas itu.

Menurut Soewargono (dalam Ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

MacIver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan,



Serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu *focus of interest*.

Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah.

Van Ylst mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

### **3. Konsep peranan**

Menurut ndraha (2003;53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soerjono Soekanto (2013:212-213) Peran Adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menurut sekanto (dalam rauf dan yusri 2015;281), peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan giroth (dalam rauf dan yusri 2015;281) memberikan pengertian tentang peranan yang hampir sama dengan pendapat soekanto, yang menyatakan bahwa : peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan, dan harapannya sendiri dari jabatan yang didudukinya dalam sistem sosial itu.

Menurut soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan-peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan ke masyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Menurut rahyunir dan yusri munaf (2015;281). peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat di artikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut.

Beberapa konsep peran dari penjelasan kita sudah mengetahui bahwa peran serta status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Terdapat konsep peran diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi peran

Persepsi peran merupakan sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku.

2. Ekspektasi peran

Ekspektasi peran ini ialah sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mau orang tersebut bertindak.

3. Konflik peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### **Struktur peran**

Secara umum, struktur peran ini dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran formal



Peran formal ini merupakan suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen.

## 2. Peran informal

Peran informal ini merupakan peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat dipermukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

### **Jenis-jenis peran**

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi –fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

### **4. Konsep Kebijakan**

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan

(*virtues*). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah -istilah lain seperti tujuan (*goals*), program , keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Menurut Ealau dan Kenneth yang di kutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Carl Friedrich (dalam Warsito Utomo. 2013;4) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Budi Winarno (2005) mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan.

#### **5. Konsep Pengelolaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) “definisi *kelola* atau *mengelola* adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan pengertian *pengelolaan* adalah proses, cara, perbuatan mengelola”.

Menurut Suprianto dan Muhsin (2008:142), mengatakan bahwa “pengelolaan adalah keterampilan untuk meramu komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan”.

Menurut Hamidi dan Lutfi (2010:153), “Pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga”.

Menurut Hasibuan (2006:2), “pengelolaan adalah Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.



Sudirman (2009:25), memandang bahwa “manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota”.

Menurut Moekijat (dalam Adisasmita 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (2007:534) adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

#### **6. *Pengelolaan Sampah***

Terry (dalam Moekijat 2001:1) mengemukakan bahwa “manajemen merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya” yang dimaksud sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan.

Hasibuan (2001:2) menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan manusia sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Andrew (dalam Hasibuan 2001:2) juga mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Terry (dalam Hasibuan 2001:2) juga mengemukakan manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Koontz dan O'Donne (dalam Hasibuan 2001:3) menyatakan manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

## **7. Konsep Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti

lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberikan batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis (dalam silalahi,2011;8).

Lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.

Menurut A. tresna sastrawijaya, M.Sc lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia ,dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pola unsur lingkungan hidup kita.

Menurut otto sunarwoto (dalam silalahi,2001;9) menyatakan lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti di indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri.



Masalah lingkungan di negara maju berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk negara-negara industri, produk samping dari perkembangan industri seperti pencemaran air, sungai dan laut akibat pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat peningkatan kadar *carbon dioxide* dari cerobong-cerobong asap motor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar dari keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat kepadatan penduduk di beberapa bagian dari wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

### **8. Konsep sampah**

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan semua sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sampah ialah semua barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, dan lain sebagainya.

Pengertian sampah menurut WHO (world health organization) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut Bahar (1986), sampah diidentifikasi menurut jenis-jenisnya yaitu:

- a. *Garbage* atau Sampah basah yaitu sampah yang berasal dari sisa pengelolaan, sisa pemasakan, atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai bahan makanan organisme lainnya.
- b. *Rubbish* atau Sampah kering yaitu Sampah sisa pengelolaan yang tidak mudah membusuk dan dapat pula dibagi atas dua golongan yaitu:
  1. Sampah yang tidak mudah membusuk, tetapi mudah terbakar.
  2. Sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar.
- c. *Ashes* dan *cinder* yaitu berbagai jenis abu dan arang yang berasal dari kegiatan pembakaran.
- d. *Dead animal*, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan
- e. *Street sweeping*, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan.
- f. *Industrial waste* merupakan sampah berasal dari kegiatan industri, sampah jenis ini biasanya homogen bila dibandingkan dengan sampah lainnya.

Menurut Setyo Purwendro sampah ialah semua bahan yang padat telah dibuang dari aktivitas rumah tangga, hotel, pasar, industri, dan aktivitas manusia lainnya sehingga sampah juga dapat diartikan sebagai sampingan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai.

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R yaitu

1. Reuse (menggunakan kembali) yaitu suatu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. Reduce (mengurangi) yakni sebuah teknik mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. Recycle (mendaur ulang) ialah untuk dapat memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengelolaan.

Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yakni sampah organik dan sampah anorganik. Berikut pengertian sampah organik dan anorganik beserta contohnya:

#### 1. Sampah organik

Pengertian sampah organik adalah jenis sampah yang dihasilkan organisme hidup, sehingga mudah membusuk dan mudah diuraikan. Sampah ini juga dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman.

Contoh sampah organik misalnya seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, kotoran dan sebagainya.

#### 2. Sampah anorganik

Pengertian sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah diuraikan. Sampah jenis ini bisa ditangani dengan cara daur ulang menjadi produk lain.

Contoh sampah anorganik misalnya seperti plastik, logam, besi, botol, minuman, kaleng, bungkus makanan, kaca dan sebagainya.



Jenis- jenis sampah berdasarkan wujudnya,jenis sampah menurut sifatnya dibagi menjadi dua yakni sampah padat dan sampah cair. Berikut pengertian sampah padat dan sampah cair beserta contohnya.

#### 1. Sampah padat

Sampah padat merupakan jenis sampah dari bahan material yang dibuang oleh manusia.

Contohnya sampah padat di antaranya seperti plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, botol minuman dan lain-lain

#### 2. Sampah cair

Sampah cair merupakan jenis sampah dari bahan cairan yang dibuang oleh manusia.

Contohnya sampah cair di antaranya air cucian, sisa cair dari dapur, sisa cair dari toilet, sisa cairan industri dan lain-lain.

### 9. Konsep Fungsi

Pengertian Fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut pada ahli, definisi fungsi menurut *The Liang Gie* dalam Nining Haslinda Zainal (Skeipsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar”,2008),Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda Zainal,2008:22) mendefinisikan Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan satu sama lain untuk

dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaanya.

Fungsi menurut Ndraha (dalam I nyoman 2010;162) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Fungsi skunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tak mampu untuk memenuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Rasyid (dalam I nyoman 2010;162) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakik, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Sedarmayani (2003:36) mendefinisikan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah:

1. Pelaksanaan fungsi pelayanan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Pelayanan ini dilakukan pemerintah melalui penyediaan fasilitas, pelayanan penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan, dan penyiapan prosedur dan mekanisme pelayanan.

2. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana, terus-menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan melalui pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya baik fisik maupun non fisik.
3. Pelaksanaan kamtibmas dan perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.

#### **B. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.



Tabel II.1 : Peneliti terdahulu terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.

<b>Nama penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Hildawati Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan di Kota Dumai	2018	Persamaan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berfokus pada pengelolaan sampah	Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu adalah dari segi waktu, objek penelitian, kebijakan
Heru Santa Program studi administrasi negara FISIP Universitas Riau	Strategi dinas kebersihan dan pertamanan dalam menanggulangi kebersihan di kota pekanbaru	2014	Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama menggunakan jenis dan sumber data	sementara perbedaan terdahulu adalah segi waktu, lokasi penelitian an juga peraturannya
Iswanto , Djumadi , Achmad Djumlani	Peranan dinas kebersihan dan pertamanan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di kota samarinda	2016	Persamaan antara penelitian terdahulu ini adalah sama-sama melakukan kerja sama dengan kelurahan dalam	sementara perbedaan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian

			pengelolaan sampah di masyarakat	
--	--	--	----------------------------------	--

**Sumber** :observasi penelitian

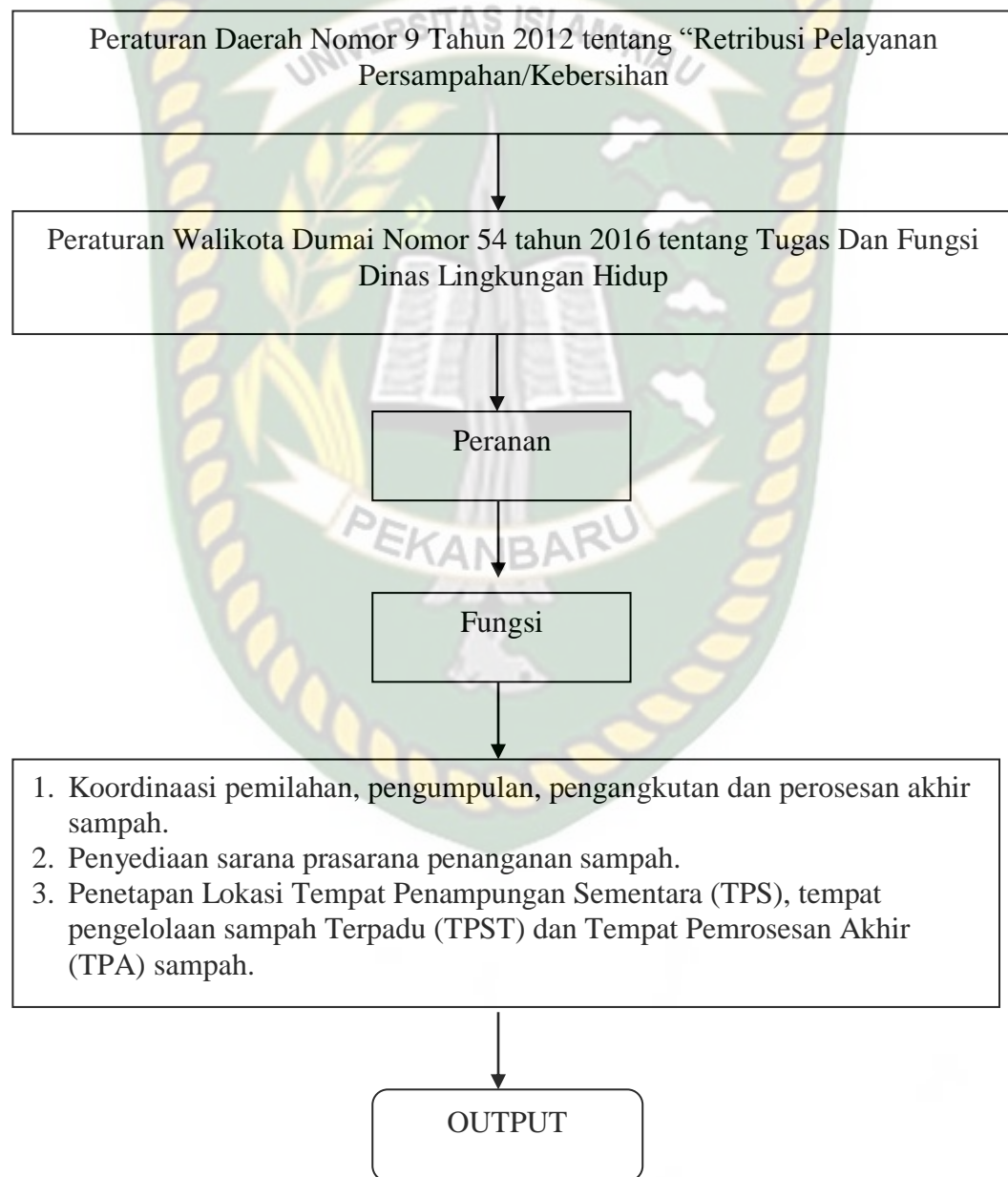
### C. Kerangka pikir.

Kerangka pikir merupakan alur penulisan karya ilmiah atau penelitian yang dilakukan yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator relevan dan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam peneliti yang peneliti lakukan terhadap peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pengelolaan sampah di kota Dumai untuk menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat.

Berdasarkan variabel penelitian “Peran”, selanjutnya diukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan peneliti menggunakan teori dari Soejono Soekanto (2002:237). Dari poin-poin peranan dari teori Soejono Soekanto, penulis menggunakan tiga (3) poin sebagai indikator.

Adapun indikator yang digunakan adalah aturan, rasional, dan struktural. Selanjutnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka pikir peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pengelolaan sampah di kota dumai.



Sumber : Observasi Penelitian.



#### **D. Konsep operasional**

Teori operasional adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

1. Peranan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.
3. sampah adalah sebuah barang yang harus bersifat padat yang tidak lagi di pergunakan dan dibuang, sehingga barang tersebut tidak bisa di uraikan dengan sempurna oleh alam yang akhirnya mengakibatkan kerusakan.
4. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.

5. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
6. sampah ialah semua bahan yang padat telah dibuang dari aktivitas rumah tangga, hotel, pasar, industri, dan aktivitas manusia lainnya sehingga sampah juga dapat diartikan sebagai sampingan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai.
7. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tempat atau wadah penampungan sampah baik berupa bak/bin/kantong/keranjang sampah yang disediakan atau digunakan oleh penghasil sampah
9. Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.

### E. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dari Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.

Tabel II.2. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda Zainal,2008:22) mendefinisikan Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaanya.	Fungsi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang “Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	Koordinasi pemilahan,pengumpulan,pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.	1. Koordinasi pemilahan sampah 2. Koordinasi pengumpulan sampah 3. Koordinasi pengangkutan sampah 4. Koordinasi pemrosesan akhir sampah
		Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah	1. Penyediaan tempat sampah 2. Penyediaan pengangkutan sampah 3. Kecukupan Sarana
		Penempatan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)Sampah	1. Penempatan TPS yang kurang strategis 2. Tempat pengelolaan sampah. 3. Bentuk pengelolaan Sampah

Sumber : observasi penelitian.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe penelitian

Metode peneliti pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa peneliti Kualitatif adalah multimetode dalam focus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistic terhadap pokok persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Oleh karena itu menfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan

harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini ada pada daerah Kota Dumai, Kecamatan lokasi yang dijadikan penelitian untuk melakukan penelitian ada pada beberapa TPS (tempat pembuangan sampah sementara) di kecamatan dumai kota yaitu TPS jalan sultan Hasanudin.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian dikarenakan dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat yang pelaksanaan kebijakannya.

## **C. Informan Dan Key Informan**

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah yang berada di TPS. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dumai. Dan yang menjadi infroman tambahan dalam penelitian ini adalah:

1. Petugas Buruh Pengangkutan Sampah
2. Masyarakat di sekitar TPS

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti, Sugiyono (2012;54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik penentuan**

Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai referensi setelah di olah. Ada pun dalam penelitian ini data yang di butuhkan terdiri dari data primer dan data skunder.

##### **1. Data primer**

Data Primer adalah data yang secara langsung yang terdiri dari beberapa indicator yang memperoleh hasil analisa yang juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari Observasi dan Wawancara.

##### **2. Data Skunder**

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan atas masalah yang di teliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi atas data primer.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Untuk dapat menghimpun data yang di perlukan, maka peulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:



1. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan kepada informan berdasarkan tujuan peneliti, dan memperoleh keterangan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab langsung Face To Face kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sumber informasi untuk memperoleh data.
3. Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis maupun data konkrit yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

#### **F. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variable dan indicator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian peneliti.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara Kualitatif, yaitu suatu penilaian yang

menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai”.

Tabel III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai.

No	Jenis kegiatan	Tahun 2020-2021																			
		Agustus-januari				Februari				Maret				April				Mei			
1	Persiapan & penyusunan UP	X	X	X	X																
2	Seminar UP					X	X														
3	Perbaikan UP							X													
4	Tujuan pembimbing							X	X												
5	Analisis D									X											
6	Bimbingan Skripsi										X										
7	Perbaikan Bab ke Bab											X	X								
8	Acc Skripsi													X							
9	Ujian Skripsi														X						
10	Perbaikan															X	X	X	X		
11	Perbanyak/Pandangan																			X	X



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Kecamatan Dumai Kota merupakan Kecamatan terkecil di Kota Dumai dengan luas daratan 13 km<sup>2</sup>.

Karakteristik Wilayah Kecamatan Dumai Kota menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0-25m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir pantai yaitu kelurahan laksamana dan kelurahan Dumai kota, sedangkan kelurahan lainnya bukan daerah pesisir pantai.

Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Dumai Kota memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat rupa.
- B. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Timur.
- C. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dumai Selatan .
- D. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dumai Barat.

Setelah pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan Dumai Kota terdiri dari 5(lima) Kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu Dumai Kota, Laksamana, Bintan, Sukajadi, dan Rimba Sekampung masing-masing dengan luas daratan 1,5 km<sup>2</sup>, 3,5 km<sup>2</sup>, 1,1 km<sup>2</sup>, 2,4 km<sup>2</sup>, dan 4,5 km<sup>2</sup>.

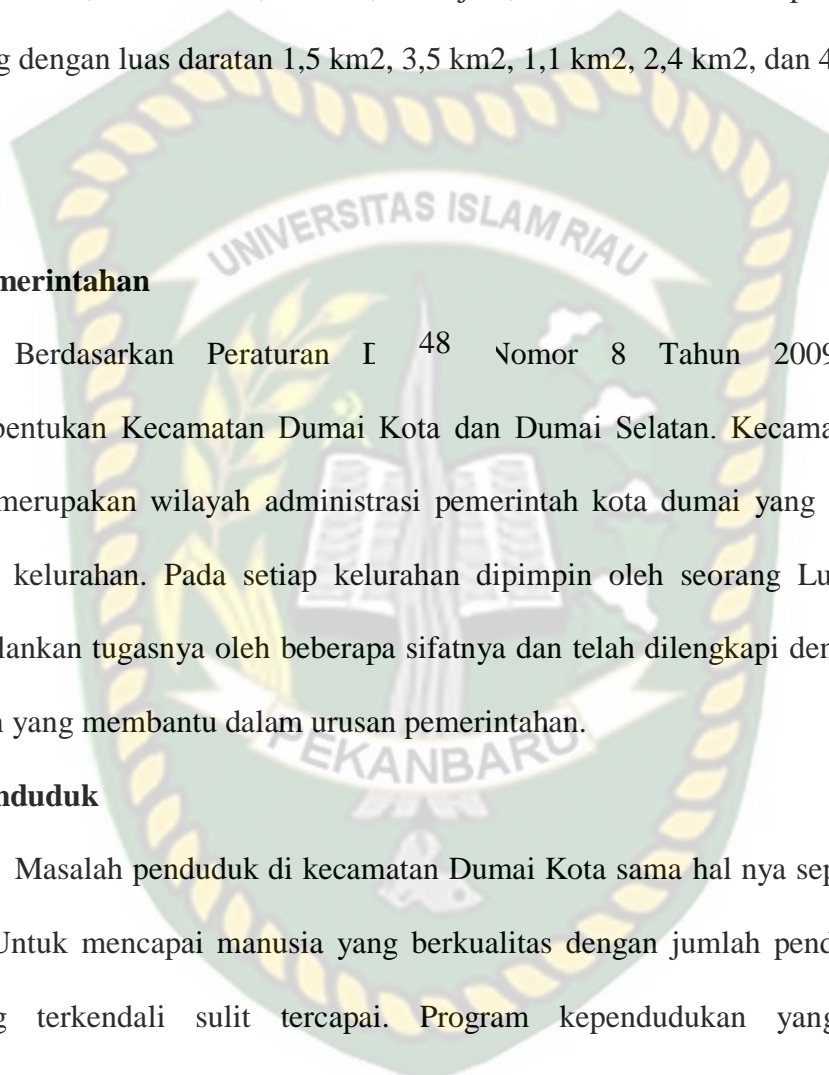
### **B. Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan I<sup>48</sup> Nomor 8 Tahun 2009 Tentang “Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Kecamatan Dumai Kota merupakan wilayah administrasi pemerintah kota dumai yang memiliki 5 (lima) kelurahan. Pada setiap kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, dalam menjalankan tugasnya oleh beberapa sifatnya dan telah dilengkapi dengan kepala urusan yang membantu dalam urusan pemerintahan.

### **C. Penduduk**

Masalah penduduk di kecamatan Dumai Kota sama hal nya seperti daerah lain. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang kurang terkendali sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran,menurunkan tingkat kematian pada bayi dan perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Penduduk di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2020 berjumlah 42.624 jiwa, yang terdiri dari 21.629 jiwa penduduk laki-laki dan 20.995 jiwa penduduk perempuan.





## D. Sosial

### 1. Pendidikan

Fasilitas di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2019 berupa pendidikan dasar tercatat sebanyak 11 unit Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Untuk pendidikan Menengah Pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 terdapat 6 unit. Sedangkan jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) baik itu negeri maupun swasta pada tahun 2019 di Kecamatan Dumai kota tercatat sebanyak 4 unit.

### 2. Kesehatan

Pemerintah menyediakan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hingga akhir tahun 2019 pemerintah menyediakan puskesmas untuk melayani masyarakat Kecamatan Dumai Kota. Selain puskesmas pemerintah juga membangun 1 unit puskesmas pembantu (Pustu). untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pemerintah juga membentuk 34 pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 34 orang. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk Kecamatan Dumai Kota sebesar 0,70 yang mengandung arti bahwa setiap 1000 orang penduduk Kecamatan Dumai Kota hanya ada 1 tenaga kesehatan.

### 3. Agama

Penduduk Kecamatan Dumai Kota sangat heterogen, namun kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga hubungan antar umat beragama terjalin dengan mesrah tanpa terjadi konflik

### **E. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahn daerah menegaskan bahwa urusan pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Inti yang terkandung dalam lingkungan hidup ini adalah adanya upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pencemaran, pengawasan, dan pemeliharaan. Semenjak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan peraturan daerah kota dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota dumai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan unsur pendukung tugas walikota dibidang lingkungan hidup. Dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut dengan berdasarkan visi dengan misi kota dumai demi mewujudkan kota dumai sebagai kota jasa dan industri merupakan penggerak keamanan perekonomian dan budaya pada tahun 2020 maka dinas lingkungan hidup kota dumai senantiasa membarikan pendampingan dalam rangka pengendalian lingkungan hidup kota dumai agar tidak terjadi kerusakan.

#### 1. Visi

Visi harus mudah dan dapat dibayangkan mengandung hasrat yang diinginkan dan mungkin dicapai, terfokus dan berwawasan serta dapat dikomunikasikan. Mudah dipahami dengan baik oleh *stakeholders* dan masyarakat. Visi harus ringkas dan menarik minat, mudah di ingat, membari inspirasi dan tantangan, dapat di percaya dan konsisten dengan nilai startegis daerah. Visi sebagai titik temu antar *stakeholders* karena menyatakan dengan jelas keadaan keberadaan instansi. Berdasarkan karakteristik tersebut maka disusunlah visi dinas lingkungan hidup kota dumai sebagai berikut: “Terwujudnya Dumai sebagai Kota pelabuhan Dumai industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu”.

## 2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai atau sesuatu yang harus dilaksanakan karena memperlihatkan secara jelas bidang-bidang pembangunan yang strategis. Misi memberikan gambaran tentang “mandate” dari *stakeholders* untuk membangun daerah. Misi mengkomunikasikan visi instansi termasuk kedudukan dan peranan *stakeholders* dalam proses tersebut.

Misi yang baik harus tegas sehingga efektif sebagai oengarah, dapat dikembangkan serta bukan merupakan daftar keinginan yang tidak mungkin dapat dicapai. Selain itu misi harus dapat diterima dan di dukung pencapaiannya oleh *stokholders* . Misi dinas lingkungan hidup adalah memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan sebagai acuan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian misi dinas lingkungan hidup kota dumai adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu.
- c. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
- d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

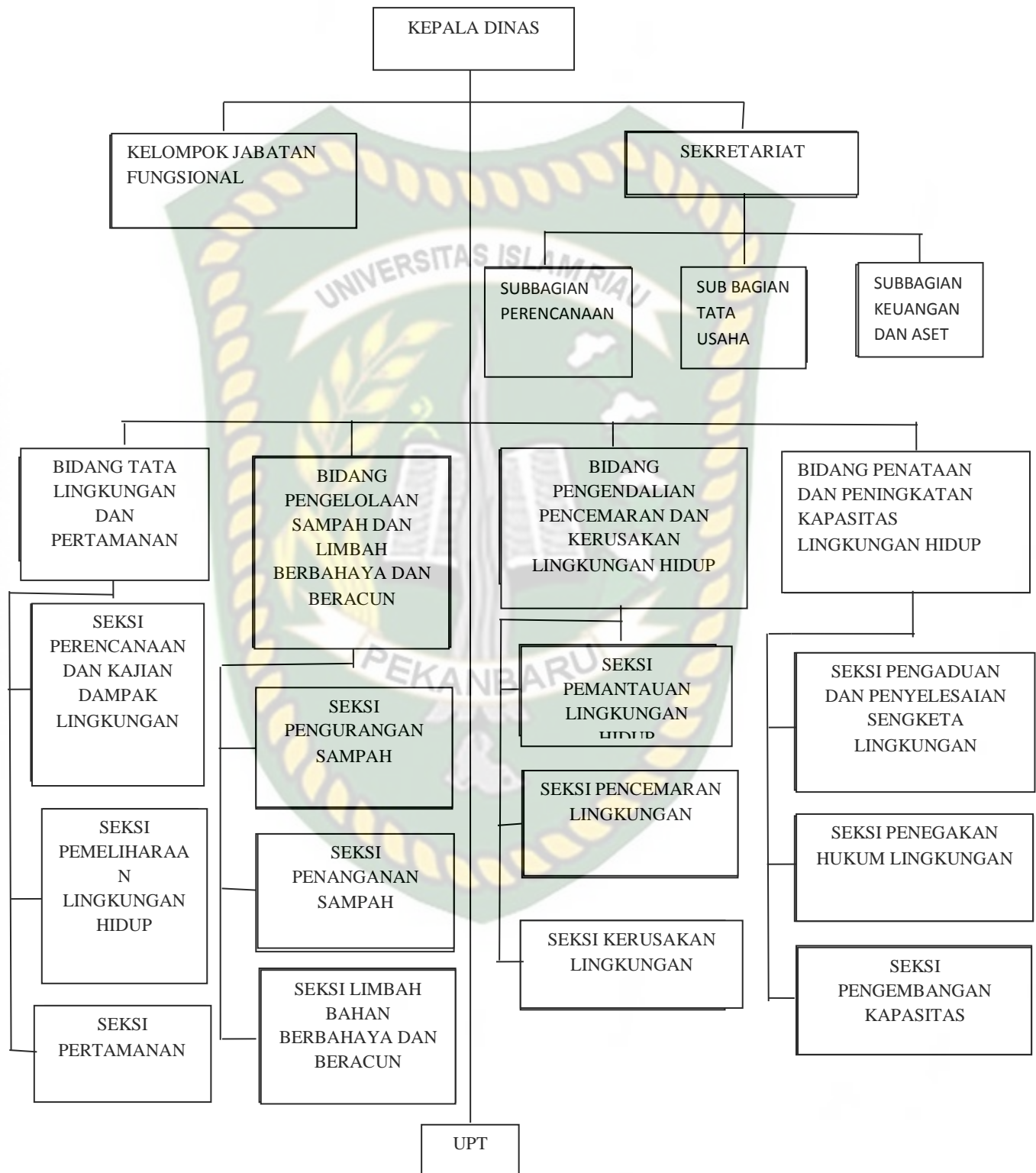


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dumai**



**F. Rincian tugas dan fungsi dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Dumai sebagai berikut:**

1. Tugas dan fungsi subbagian perencanaan:
  - a. Mengatur bermacam-macam bahan pemberlakuan, strategi khusus, aturan dan arahan khusus seperti bahan yang berbeda diidentifikasi dengan peraturan rencana program, penilaian dan pengungkapan.
  - b. Siapkan bermacam-macam informasi dan informasi para eksekutif dan data yang diidentifikasi dengan pemrograman, penilaian dan pengungkapan.
  - c. Mengatur definisi aturan dan arahan khusus dalam perencanaan rencana program, penilaian dan perincian
  - d. Menyiapkan bahan untuk perencanaan rencana jangka panjang, menengah, dan sementara/ program dan latihan sebagai rencana kunci yang berwibawa, hanya sebagai bahan untuk mengamati, mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program.
  - e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan ujian dan penilaian serta menyusun tulisan tentang pelaksanaan program dan pemenuhan tanggung jawab pelaksanaan.
  - f. Merencanakan bahan untuk koordinasi dengan unit kerja/ dinas terkait untuk kelancaran pelaksanaan penugasan
  - g. Menyiapkan bahan rencana untuk spekulasi masalah dan penyelidikan arah

h. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.

2. Tugas dan fungsi subbagian tata usaha:

- a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari hukum dan pedoman, pendekatan khusus, aturan dan arahan khusus seperti bahan yang berbeda diidentifikasi dengan peraturan bantuan peraturan otoritatif, staf, file dan dokumentasi.
- b. Mengatur bermacam-macam, eksekutif, penimbunan dan pemeliharaan bahan untuk pengaturan bantuan otoritatif, staf, file dan dokumentasi.
- c. Merencanakan staf manajerial untuk pergi ke persiapan utama, khusus dan berguna
- d. Mengatur bermacam-macam dan menyiapkan informasi dan data mengidentifikasi dengan pengaturan bantuan manajerial, kepegawaian, file dan dokumentasi.
- e. Merencanakan materi untuk definisi strategis, aturan dan pedoman khusus dalam menawarkan bantuan manajerial untuk organisasi, kepegawaian, file dan dokumentasi.
- f. Masalah persiapan dan merencanakan bahan panduan investigasi.
- g. Berorganisasi dengan unit/kantor terkait sesuai dengan kewajibannya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewajiban.

- h. Menyiapkan bahan untuk pengarahan dan pengawasan di bidang asosiasi dan pengurusan yang meliputi kelembagaan, pengurus dan pemeriksaan jabatan
- i. Menyiapkan bahan untuk mengawasi korespondensi/ isi dan arsip resmi
- j. Menyiapkan bahan pustaka di samping pelaksanaan periklanan dan konvensi
- k. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.

3. Tugas dan fungsi subbagian keuangan dan asset.

- a. Mengatur bermacam-macam pedoman hukum, strategi khusus, aturan khusus dan arahan seperti bahan yang berbeda diidentifikasi dengan organisasi keuangan administrasi properti/ sumber daya negara dan kantor program.
- b. Rencanakan materi untuk definisi strategi dan aturan khusus untuk organisasi moneter, dewan properti negara dan kantor program
- c. Menyiapkan bahan perencanaan untuk usaha moneter, penyimpanan, pembukuan, cek, remunerasi LHP dan eksekutif perkantoran.
- d. Mengatur pengaturan untuk kebutuhan dan pengurusan materi keluarga
- e. Siapkan bahan untuk masalah penyimpanan dan pedoman investigasi
- f. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan unit kerja/ organisasi terkait untuk kelancaran pelaksanaan usaha.
- g. Menyiapkan bahan rencana kesiapan laporan pelaksanaan organisasi moneter, penyelenggaraan kekayaan/ sumber daya negara dan kantor program



h. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban mereka.

4. Tugas dan fungsi subbagian tata lingkungan dan pertamanan.

- a. Penyusunan rencana strategi khusus untuk penilaian, pengarahan, pengawasan khusus atas investigasi efek alamiah para eksekutif dan UKL-UPL.
- b. Penyimpanan informasi dan data untuk perencanaan jaminan ekologi dan rencana eksekutif serta investigasi alam utama.
- c. Arahan dan pengawasan pelaksanaan kerangka kerja administrasi alam yang terkoordinasi
- d. Administrasi otorisasi, saran ekologi dan catatan khusus alam (AMDAL dan UKL-UPL).
- e. Menyiapkan definisi pendekatan untuk perlindungan kapasitas ekologi, pembangunan kembali alam.
- f. Koordinasi dalam perencanaan pencatatan alam (AMDAL, UKL - UPL), serta koordinasi dalam penataan dan pelaksanaan RPPLH dan KLHS.
- g. Pengendalian perubahan lingkungan
- h. Definisi pengaturan khusus, arahan dan pengawasan penggunaan instrumen keuangan dalam administrasi aset normal dan iklim.
- i. Mengarahkan evaluasi AMDAL dan memberikan saran UKL-UPL.

- j. Bahan perencanaan dalam struktur pembentukan strategi khusus seperti mendorong pelaksanaan administrasi dan pengecekan ekologi.
  - k. Arahan dan pengawasan penggunaan kerangka kerja administrasi ekologi, ecolabel, kreasi bersih.
  - l. Kegiatan administrasi otorisasi, saran alam dan arsip khusus AMDAL, UKL-UPL.
  - m. Pengaturan bahan dalam sistem perencanaan strategis khusus, mendorong dan mengelola penggunaan instrumen keuangan dalam administrasi aset reguler dan iklim
  - n. Kesiapan berbagai kapasitas diturunkan oleh puncak divisi sesuai tingkat kapasitasnya.
5. Tugas dan fungsi subbagian seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- a. Informasi saham dan data aset
  - b. Menyiapkan bahan rekaman RPPLH.
  - c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan sinkronisasi susun RPPLH dalam rencana perbaikan dan rencana jangka menengah yang telah disusun.
  - d. Siapkan bahan untuk observasi dan penilaian pelaksanaan RPPLH.
  - e. Merakit bahan yang menentukan batas dan batas pengangkutan iklim.
  - f. Menyiapkan bahan kodinasi penyusunan penataan ruang tergantung pada batas pengangkutan dan batas iklim.

- g. Memimpin penataan meterial sinkronisasi RPPLH publik, pulau/nusantara dan ekoregion.
  - h. Persiapan bahan status ekologi, catatan kualitas alam, investigasi ekologi kunci.
  - i. Merencanakan bahan status ekologi, catatan kualitas alam, pemeriksaan alam yang vital RPPLH.
  - j. Siapkan bahan untuk kantor permintaan publik dalam pelaksanaan KLHS, arahan pelaksanaannya KLHS.
  - k. Merencanakan materi observasi dan penilaian KLHS.
  - l. Menyiapkan bahan untuk koordinasi kesiapan instrumen pencegahan kontaminasi dan/atau bahaya ekologi (AMDAL,UKL-UPL, limbah alam, tinjauan ekologi, pemeriksaan bahaya ekologi).
  - m. Siapkan bahan evaluasi untuk arsip alami langsung (status asesor, kelompok spesialis dan ahli).
  - n. Merencanakan bahan untuk pelaksanaan tindakan otorisasi alami
  - o. Memberikan bimbingan dan renungan khusus kepada atasan dalam melakukan kewajibannya.
  - p. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang ditawarkan oleh kewajiban dan kapasitas.
6. Tugas dan fungsi subbagian seksi pemeliharaan lingkungan hidup.

- a. Dapatkan bahan defisini siap dan pengaturan khusus di segmen konservasi ekologi.
- b. Bahan rencana untuk jaminan aset reguler, pengamanan aset umum, pemanfaatan aset karakteristik yang layal, penyimpanan aset normal, upaya untuk mengurangi dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, stok GRK dan pengaturan profil pembuangan GRK
- c. Memimpin kesiapan bahan penataan pelestarian keanekaragaman hayati.
- d. Melakukan perencanaan bahan untuk dasar pengaturan dan pelaksanaan pelestarian, penggunaan ekonomis dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- e. Mengarahkan penataan bahan untuk pemeriksaan dan pengelolaan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati.
- f. Melengkapi kesiapan bahan kompromi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- g. Memimpin kesiapan bahan untuk perbaikan kerangka data dan papan basis informasi keanekaragaman hayati.
- h. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.

7. Tugas dan fungsi subbagian seksi pertamanan.

- a. Menyusun rencana kerja dan langkah - langkah reklamasi ruas taman



- b. Menyiapkan bahan penataan dan menyajikan rekomendasi kebutuhan kerangka dan penanaman.
  - c. Rencanakan bahan pendukung dan jaga kerapian, keunggulan dan permintaan di sekitar ruang terbuka hijau dan berhenti di dekatnya.
  - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi/kerjasama/ kantor/ yayasan atau gathering terkait dalam pengurusan dan pemeliharaan taman di kecamatan.
  - e. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.
8. Tugas dan fungsi subbagian pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- a. Kesiapan data administrasi persampahan
  - b. Fokus pada pengurangan sampah
  - c. Rencana strategi pengurangan limbah
  - d. Arahan untuk membatasi tumpukan limbah bagi pembuat/bisnis.
  - e. Mendorong pemanfaatan kreasi bahan mentah dan bundling yang dapat digambarkan oleh siklus umum lainnya.
  - f. Penataan kantor yang menggunakan kembali limbah.
  - g. Membudidayakan penggunaan kembali limbah dari item dan bundling item.
  - h. Rencana pendekatan pengelolaan sampah.

- i. Koordinasi pengaturan, pengumpulan, pemindahan, dan penanganan sampah akhir.
- j. Penataan sampah yang berhubungan dengan kerangka kerja.
- k. Berbagai macam biaya untuk menyia-nyiakan administrasi dewan
- l. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPSPT) dan tempat pemrosesan akhir (TPA)sampah.
- m. Pengawasan TPA dengan kerangka kerja pemindahan bongkar muat terbuka.
- n. Kesiapan dan pelaksanaan kerangka kerja reaksi krisis administrasi limbah.
- o. Membayar efek negatif dari pemborosan latihan persiapan terakhir.
- p. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai daerah/ masyarakat kota dan organisasi yang menyia-nyiakan substansi pengurusan dalam melakukan penatausahaan sampah.
- q. Peningkatan spekulasi dalam menyia-nyiakan bisnis dewan.
- r. Akumulasi strategi otorisasi untuk menyia-nyiakan papan, menyia-nyiakan transportasi dan penanganan limbah terakhir yang di koordinasikan oleh area pribadi.
- s. Melaksanakan pemberian administrasi persampahan, pemborosan pengangkutan dan penyiapan sampah terakhir dilakukan oleh pihak pribadi.
- t. Rencana pengaturan untuk arahan dan pengawasan penyajian pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pertemuan yang berbeda (badan swasta)

- u. Melaksanakan dan mengarahkan serta mengawasi pameran administrasi persampahan yang diselesaikan oleh berbagai pertemuan (badan swasta).
  - v. Definisi pengaturan untuk kapasitas sementara dari bahan berbahaya (akomodasi, perluasan, revisi dan penolakan)
  - w. Melaksanakan perizinan untuk kapasitas sementara dari bahan berisiko dan berbahaya.
  - x. Melaksanakan pemeriksaan dan mengawasi penimbunan sementara bahan berisiko dan berbahaya.
  - y. Pengaturan strategi perizinan untuk bermacam-macam dan transportasi bahan yang tidak aman dan berbahaya (akomodasi, perluasan, perubahan dan penolakan).
  - z. Melaksanakan otorisasi untuk pengangkutan bahan yang tidak aman dan berbahaya dengan menggunakan transportasi roda tiga menyiratkan.
  - aa. Melaksanakan otorisasi hibah TPA bahan tidak aman dan berbahaya
  - bb. Melaksanakan lisensi interniran untuk materi yang tidak aman dan berbahaya.
  - cc. Mengamati dan mengawasi administrasi, penggunaan, transportasi dan penimbunan bahan yang tidak aman dan berbahaya.
  - dd. Perencanaan kapasitas berbeda yang dialokasikan oleh puncak divisi sesuai dengan tingkat kapasitasnya.
9. Tugas dan fungsi subbagian seksi pengurangan sampah.

- a. Membangun target penurunan pemborosan dan membutuhkan jenis pembakaran untuk setiap jangka waktu tertentu.
  - b. Membentuk pengaturan pengurangan limbah.
  - c. Lakukan arahan untuk membatasi tumpukan limbah pada pembuat/bisnis.
  - d. Melakukan arahan tentang pemanfaatan bahan mentah pembuatan dan bundling yang dapat dihancurkan oleh siklus karakteristik.
  - e. Petunjuk lengkap untuk pendaur ulang yang sia-sia.
  - f. Menyediakan fasilitas dengan mendaur ulang sampah.
  - g. Arahan langsung tentang penggunaan kembali limbah dari item dan bundling item.
  - h. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.
10. Tugas dan fungsi subbagian seksi penanganan sampah.
- a. Merumuskan kebijakan penanganan sampah.
  - b. Mengordinasikan menyusun, mengumpulkan, memindahkan dan terakhir menyiapkan sampah.
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah.
  - d. Mengumpulkan biaya untuk administrasi dewan.
  - e. Menetapkan lokasi tempat yang strategi TPS, TPSP dan TPA sampah.
  - f. Mengatur tempat pembuangan sampah dengan kerangka asap terbuka
  - g. Melaksanakan kerangka kerja reaksi krisis administrasi limbah.



- h. Membayar efek negatif dari latihan penanganan terakhir limbah.
  - i. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai daerah/perkotaan dan organisasi dengan menyia-nyiakkan substansi bisnis pelaksana dalam melakukan penatausahaan persampahan.
  - j. Menciptakan minat untuk bisnis pengelolaan sampah
  - k. Mengumpulkan pengaturan otorisasi untuk dewan, pengangkutan limbah dan untuk penyiapan limbah yang pasti dikoordinasikan oleh area pribadi
  - l. Melaksanakan kewenangan penuh untuk para eksekutif, transportasi dan penanganan sampah terakhir yang diawasi oleh kawasan pribadi.
  - m. Menentukan pengaturan untuk arahan dan pengawasan penyajian administrasi limbah yang dikoordinasikan oleh pertemuan yang berbeda (badan swasta).
  - n. Menyelesaikan pelatihan dan pengecekan pelaksanaan administrasi persampahan yang dilakukan oleh perkumpulan yang berbeda (badan swasta).
  - o. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajiban.
11. Tugas dan fungsi subbagian seksi limbah berbahaya dan beracun.
- a. Membentuk strategi perizinan untuk kapasitas sementara dari bahan yang tidak aman dan berbahaya (akomodasi, augmentasi, perubahan dan penolakan) di dalam daerah
  - b. Melakukan perizinan untuk kapasitas sementara dari bahan berbahaya di sekitar.

- c. Pengamatan lengkap dan pengelolaan penimbunan singkat bahan berbahaya dan di dalam wilayah.
- d. Menggabungkan strategi perizinan untuk bermacam-macam dan transportasi bahan berbahaya dan beracun (akomodasi, perluasan, perubahan dan penolakan) di dalam area
- e. Melaksanakan lengkap untuk otoritas materi berbahan berbahaya dan tidak aman.
- f. Melakukan perizinan untuk pengangkutan bahan berbahaya dan tidak aman dengan menggunakan sarana transportasi roda tiga di dalam wilayah tersebut.
- g. Otorisasi untuk pembongkaran material yang berisiko dan berbahaya dilakukan di wilayah tersebut
- h. Melakukan perizinan penguburan bahan klinis berbahaya dan bahan tidak aman.
- i. Mengamati dan mengatur administrasi penggunaan, pengangkutan dan penimbunan bahan berisiko dan berbahaya.
- j. Memberikan bimbingan dan masukan khusus kepada atasan dalam menyelesaikan kewajibannya.
- k. Melakukan menilai dan melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada atasan.
- l. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.

12. Tugas dan fungsi subbagian bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- a. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan campuran dengan organisasi terkait dalam mengendalikan otorisasi yang diidentifikasi dengan masalah efek ekologi
- b. Definisi pedoman, arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang kontramendasi dan kerusakan ekologis.
- c. Mendorong bantuan khusus untuk mencegah dan mengendalikan kontaminasi dan kerusakan alam.
- d. Melaksanakan pemeriksaan ekologi dan pengorganisasian latihan.
- e. Eksplorasi dan investigasi informasi tentang kemungkinan bahaya alam.
- f. Mendorong kerjasama area lokal yang diperluas dalam latihan pengendalian kerusakan ekologis
- g. Melaksanakan memeriksa, menilai dan memberikan rincian tentang pelaksanaan latihan pengendalian kerusakan ekologis sesuai pedoman terkait.
- h. Pengaturan kapasitas berbeda yang dialokasikan oleh bagian atas devisi sesuai luas kapasitasnya.

13. Tugas dan fungsi subbagian seksi pemantauan lingkungan.

- a. Mengumpulkan proyek dan rencana kerja, sebagai aturan untuk melaksanakan usaha.
- b. Persiapkan arahan khusus untuk pemeriksaan dan pengorganisasian ekologi.

- c. Menyelesaikan latihan pengamatan dan pengorganisasian alami
- d. Melihat kualitas air dan udara.
- e. Memeriksa sifat kualitas pantai dan iklim laut.
- f. Strategi pencampuran yang diidentifikasi dengan iklim
- g. Untuk membuat persediaan ranjau kelas “C” dan latihan bisnis lainnya.
- h. Mengarahkan dan menyaring iklim ke arah konsistensi pemrakarsa dalam mempertahankan bisnisnya dan juga melakukan latihan sesuai pengaturan hukum.
- i. Strategi perencanaan untuk melaksanakan pengendalian perubahan lingkungan, lapisan ozon dan memeriksa efek pernyataan korosif.
- j. Menyaring jalannya aksi tatanan global pertunjukan dan konvensi di kawasan alami dalam skala kota.
- k. Melakukan kordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan.
- l. Mengatur sejauh pengamatan ekologi dan rencana.
- m. Siapkan masalah yang diidentifikasi dengan bidang pekerjaan mereka dan siapkan materi pengarahan berpikir kritis.
- n. Melakukan pengecekan dan penilaian proyek dan latihan dan membuat sampul hasil akhir dari pelaksanaan tugas.



- o. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.

14. Tugas dan fungsi subbagian seksi pencemaran lingkungan.

- a. Mengakumulasi aturan dan pedoman khusus untuk kontaminasi alami.
- b. Siapkan bahan untuk definisi pedoman, arahan, pengawasan dan pengendalian kontaminasi ekologi.
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi, data dan sinkronisasi serta pengendalian pencemaran alam dengan instansi pemerintah, asosiasi non legislatif dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Siapkan bahan untuk pelaksanaan kantor dan bantuan khusus untuk melawan dan mengendalikan kontaminasi ekologi sesuai pedoman terkait.
- e. Penanganan kontaminasi alami di pinggir pantai dan zona laut.
- f. Mengumpulkan, mengukur dan memeriksa informasi kontaminasi alam.
- g. Menyiapkan bahan kerja sama/ asosiasi dengan yayasan penelitian/ kajian di kawasan ekologi, instansi pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat, dan/ atau swasta terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran alam.
- h. Mengendalikan pengolahan limbah yang tidak dapat mengotori iklim
- i. Lakukan siklus saran dan berikan administrasi pembuangan air tidak sehat.
- j. Melakukan observasi, penilaian dan perincian pelaksanaan usaha.

k. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.

15. Tugas dan fungsi subbagian seksi kerusakan lingkungann.

- a. Menyusun aturan dan pedoman khusus untuk bahaya alam.
- b. Menyiapkan bahan rencana untuk definisi pedoman, arahan, pengelolaan dan pengendalian bahaya alam.
- c. Merencanakan bahan untuk koordinasi, data dan sinkronisasi di sub-area bahaya ekologi dengan kantor pemerintah, asosiasi non-legislatif dan/ atau area privat sesuai pedoman yang relevan.
- d. Merencanakan bahan untuk pelaksanaan kantor dan bantuan khusus untuk mengantisipasi dan mengendalikan bahaya alam sesuai dengan pedoman.
- e. Menangani kerusakan ekologis di wilayah pinggir laut dan pantai.
- f. Melakukan koordinasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- g. Mengatur pengendalian dan penanggulangan kerusakan yang diidentifikasi dengan api hutan, tanah dan juga peristiwa bencana alam.
- h. Menyelesaikan kepastian wilayah yang terancam bencana alam dan yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
- i. Mengarahkan dan mengendalikan kerusakan lahan dan/ atau tanah karena latihan penciptaan biomassa.
- j. Mengumpulkan, mengukur dan memeriksa informasi kerusakan ekologi.

- k. Menyiapkan bahan untuk kolaborasi/ asosiasi dengan yayasan penelitian/ kajian di kawasan alam, kantor pemerintahan, asosiasi non administrasi dan/ atau kawasan privat yang berkaitan dengan dan penanggulangan kerusakan ekologis
  - l. Melakukan pengecekan, penilaian dan pengungkapan eksekusi.
  - m. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.
16. Tugas dan fungsi subbagian bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- a. Menilai dan mendefinisikan pengaturan khusus tentang keberatan terbuka.
  - b. Menindaklanjuti keluhan terbuka terkait pemikiran kritis.
  - c. Koordinasi dengan mitra dalam memutuskan langkah selanjutnya untuk protes publik.
  - d. Penerapan hukum alam.
  - e. Evaluasi berbagai kemungkinan buruk yang dapat mengganggu iklim.
  - f. Mengatur pengamanan terhadap kontaminasi ekologi dan/ atau bahaya
  - g. Bergerak dan memberikan sanksi pada kasus kontaminasi ekologi dan/ atau kerusakan
  - h. Sekolah dan persiapan di bidang ekologi sesuai masalah alam.
  - i. Perbaikan dan aktivitas data kualitas alam.

- j. Arahan dan pengawasan penggunaan SNI dan pedoman kompetensi tenaga kerja di bidang tata alam.
  - k. Penggunaan kapasitas berbeda yang diturunkan oleh puncak divisi sesuai dengan tingkat kapasitasnya.
17. Tugas dan fungsi seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- a. Menyiapkan definisi strategi khusus di bidang pengaduan dan penilaian.
  - b. Menawarkan bantuan untuk pengorganisasian masalah di bidang pengaduan dan penilaian.
  - c. Membina dan melaksanakan kewajiban di bidang keberatan dan penilaian.
  - d. Siapkan bahan pemikiran kritis untuk membahas kembali keluhan di area lokal.
  - e. Merakit langkah-langkah gerakan dan menilai sesuai dengan pengaturan hukum dan pedoman.
  - f. Menilai semua latihan yang telah diselesaikan.
  - g. Membuat laporan tentang latihan dan penugasan sebagai data dan tanggung jawab kepada atasan.
  - h. Memberikan data (tersebar luas) tentang administrasi yang berwenang untuk masyarakat umum dan kantor, baik pemerintah maupun swasta.
  - i. Merencanakan bahan data untuk administrasi data.
  - j. Mendapatkan keberatan yang datang dari masyarakat umum, kantor pemerintahan dan pihak swasta.



- k. Pengembangan lengkap atas keberatan dari masyarakat umum, pemerintah dan organisasi swasta.
  - l. Bertanggung jawab atas informasi administrasi dan latihan penilaian kepemimpinan tentang pengaturan administrasi yang berwenang.
  - m. Bekal masalah dan siapkan informasi/ bahan untuk berfikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaannya.
  - n. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.
18. Tugas dan fungsi subbagian penegakan hukum lingkungan.
- a. Memimpin persyaratan hukum kodrat.
  - b. Mengatur pengaturan untuk aktivitas terhadap contoh kontaminasi dan/ atau kerusakan alam.
  - c. Mengorganisir latihan untuk menuntut kasus kontaminasi dan/ atau kerusakan iklim.
  - d. Melakukan aktivitas terhadap contoh kontaminasi alam dan/ atau kerusakan lingkungan.
  - e. Perencanaan melaksanakan latihan yang diidentifikasi dengan masalah peraturan khusus untuk tindakan perizinan dan non-otorisasi.
  - f. Survei berbagai jenis hibah yang dapat mengganggu iklim.

- g. Melakukan pemeriksaan, administrasi, pengaduan dari lingkungan ekologi lokal, menangani kasus alam, dan mengatur pelaksanaan dan tujuan pertanyaan alam.
  - h. Menyelesaikan masalah terkait otorisasi dan non perizinan bergantung pada hukum dan pedoman utama untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban.
  - i. Menilai kasus perizinan dan dakwaan kontaminasi ekologi dan/ atau bahaya.
  - j. Memberikan informasi dan laporan kepada ketua pelaksanaan hukum alam berbadan hukum.
  - k. Siapkan bahan untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.
19. Tugas dan fungsi subbagian seksi pengembangan kapasitas.
- a. Penyusunan program agregat dan penilaian pelaksanaan tugas.
  - b. Melakukan instruksi dan persiapan di bidang ekologi sesuai masalah alam.
  - c. Membangun batas staf ekologi.
  - d. Melakukan pengecekan dan penilaian ekologi.
  - e. Perencanaan dengan kantor pemerintah yang diidentifikasi dengan batas kerja untuk fakultas alam.
  - f. Mengawasi perpustakaan alam.
  - g. Lakukan koordinasi dengan pemerintah dan organisasi swasta dalam hal menciptakan inovasi data alami

- h. Merencanakan materi untuk berbagai tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kewajibannya.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Responden**

Dalam melakukan sebuah penelitian maka sangatlah penting dijelaskan dan dijabarkan mengenai identitas informan penelitian agar pembaca merasa percaya bahwa penelitian telah dilaksanakan serta bertanggungjawab dalam melakukan proses penelitian yang jelas serta sesuai dengan substansi dari penelitian. Dengan ini peneliti akan menjelaskan identitas informan yang telah diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini diantaranya mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan serta usia informan.

Tabel V.I : Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Arief Saputra. ST	Laki-Laki	39	S1	Kepala Seksi Penanganan Sampah
2.	Suwardi	Laki-Laki	62	SD	Ketua Rukun Tetangga (RT)
3.	Budi	Laki-laki	38	SMA	Petugas Buruh Angkut sampah

*Sumber : olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2021.*

Berdasarkan tabel yang tertera diatas maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Arief Saputra. ST selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah Petugas Buruh Angkut Sampah dan juga Ketua Rukun Tetangga (RT) disekitar TPS Kota Dumai.

Dengan beberapa informan dan satu yang menjadi informan kunci di dalam penelitian ini seperti yang telah peneliti sebutkan diatas, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup merupakan informan kunci yang merupakan responden yang dianggap paling penting oleh peneliti. Dikarenakan mampu memberikan informasi serta dapat memberikan jawaban yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan indikator yang digunakan oleh peneliti. Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Petugas Buruh Angkut Sampah juga merupakan hal yang penting dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan



penelitian ini dikarenakan petugas buruh angkut sampah yang langsung mengambil sampah di TPS dan tau kondisi dilapangan sekitar TPS Kota Dumai,yang memberikan jawaban dan informasi terkait pengelolaan sampah yang berada di Kota Dumai.

#### **B. Hasil Penelitian Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai.**

Dari hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam armada pengangkutan sampah mengalami kekurangan sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan sampah hingga saat ini hanya melakukan penimbunan terhadap sampah yang dibawa dari TPS dan berharap permasalahan ini dapat teratasi. Sehingga pengelolaan sampah tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kota dumai dibutuhkan pekerja buruh pengangkut sampah kota dumai untuk menjalankan peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan segera terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam peran dinas tersebut.

Peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah merupakan tugas yang harus di jalankan dengan baik oleh dinas lingkungan hidup kota dumai. Dalam peran dinas lingkungan hidup kota dumai harus meningkatkan Koordinasi

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, Penempatan lokasi penampungan sementara (TPS), Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA), Hambatan pengelolaan sampah.

**a. Koordinasi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah.**

Koordinasi upaya dalam petugas buruh angkut sampah sehingga menjadi lebih dipahami dan dijalankan. Seperti koordinasi pemilahan, pengumpulan serta pengangkutan yang akan menjadi suatu tujuan agar berjalan dengan lancar.

Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait dinas lingkungan hidup ada melakukan koordinasi mengenai pengelolaan sampah.

Menurut kepala seksi penanganan sampah bapak arief Saputra. ST mengatakan :

*“kalau dari kasi masing-masing memiliki pengawasan lapangan jadi selalu melakukan koordinasi kepada pengawas juga sama supir angkutan mobil dan truck sampah untuk selalu mengecek dan mengangkat sampah yang ada di kota Dumai yang termasuk angkutan retribusi”.* (4 maret 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai petugas buruh angkut sampah Menurut Bapak Budi mengatakan:

*“koordinasi sudah ada dilakukan oleh antara supir dengan pengawas Dinas Lingkungan Hidup agar tetap berkerjasama dalam menangani sampah yang bisa didaur ulang ataupun tidak bisa di daur ulang”.* (8 maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemilahan diberikan kepada petugas buruh angkut sampah setiap hari. Koordinasi

tersebut diarahkan pada saat sebelum melaksanakan tugas oleh pengawas yang sudah ditentukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengontrol kinerja petugas buruh angkut sampah di lapangan, apabila ada keluhan maka pengawas yang melapor kepada atasannya agar diselesaikan masalahnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai pelaksanaan koordinasi pada saat pengumpulan sampah

Menurut Arief Saputra.ST mengatakan:

*“tetap sama dengan yang sebelum tidak jauh-jauh hubungannya antara pengawas dengan pimpinan di kantor, tetap saling berkomunikasi apabila ada sampah yang berserakan atau pun di TPS dan TPA sudah penuh kami tetap berkomunikasi dan hubungi apabila TPS dan TPA itu sudah penuh dengan sampah”.* (4 maret 2021)

Lalu jawaban tidak jauh berbeda di ungkapkan oleh Bapak Budi mengatakan:

*“melakukan koordinasi pada pengawas yang mengenai pada saat pengumpulan sampah dan tetap saling berkomunikasi apabila ada kendala dilapangan”*(8 maret 2021)

Dari jawaban informan yang penulis rangkum, maka dapat dilihat bahwa adanya koordinasi pada saat pengumpulan sampah dapat berupa pengawasan agar kondisi dilapangan menjadi lebih kondusif. Terutama kepada petugas buruh angkut sampah agar segera melaporkan kepada pengawas apabila terdapat di TPS dan TPA sudah penuh.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa koordinasi pada saat pengumpulan sampah berupa tidak berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan bahwa masih terdapat penumpukan sampah di TPS. Sampah yang ada

semakin banyak di TPS dan menimbulkan aroma yang mengganggu pengguna jalan pada saat melintas di TPS.

Lalu selanjutnya penulis mewawancarai mengenai pelaksanaan koordinasi pada proses pengangkutan sampah di TPS yang dibawa ke TPA

Menurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan:

*“dengan mobil armada kami dum truck sampah satu hari ada sekitar 18 unit dumtruck, yang setiap hari jalan mereka setiap mobil angkut sampah itu masing-masing TPS yang sudah ditentukan oleh pengawasnya masing-masing, jadi setiap mereka melakukan pengangkutan sampah di TPS itu langsung melapor ke dinas untuk di foto menjadikan bukti laporan kami terima laporannya kemudian di tutup sampahnya kemudian langsung proses buang ke TPA.”*(4 maret 2021)

Selanjutnya menurut Bapak Budi mengatakan :

*“sudah ada koordinasi dari supir kepada pengawas yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai”*(8 maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada proses pengangkutan sampah di TPS yang dibawa ke TPA berupa setiap armada yang sudah di siapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada petugas buruh angkut sampah yang akan mengangkut sampah di TPS yang sudah ditentukan oleh pengawasnya masing-masing, dan apabila sudah selesai dari TPS maka petugas buruh selanjutnya kembali lagi ke Dinas agar melapor ke pengawasnya dan menutupi sampah itu agar tidak berserakan di jalan pada saat ke TPA.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa koordinasi yang sudah dilakukan dengan cukup baik. Namun armada buat angkut sampah masih kurang karena apabila mobil itu rusak pada saat mau angkut sampah



maka mobilnya tidak bisa berjalan dan sampah yang di TPS mengakibatkan penumpukkan.

Selanjutnya penulis wawancarai mengenai koordinasi pemrosesan akhir sampah di TPA menurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan:

*“koordinasinya sama kayak tadi,mobil pembuangan sampah dari TPS ke TPA mereka langsung buang ke TPA yang sudah ditentukan ada beberapa kolam sampah ada 3 buah kolam sampah di TPA,jadi kolam-kolam yang belum terisi penuh mereka langsung membuang ke tempat kolam yang belum terisi penuh, apabila sudah terisi penuh kami langsung menimbunnya,disebab kan masih sifatnya *countrolingfil* bukan *sanidanfil*, jadi *countrolingfil* itu kalau pengurangan sampah kami masih mengandalkan SDM seperti pemulung yang mengambil sampah buat di daur ulang,kecuali sanitari bersifat dari pemerintah daerah itu sudah menyiapkan khusus izin SK dan pelaksana-pelaksana pembuangan sampah itu ada izin-izin,kalau buat program sanitari ada program tahun ini.”(4 maret 2021)*

Menurut Bapak Budi sebagai petugas buruh angkut sampah mengatakan:

*“dalam koordinasi pemrosesan akhir sampah sudah dilakukan oleh pengawas kepada supir agar kerjasamanya berjalan dengan baik dalam membawa sampah ke TPA”.*(8 maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemrosesan akhir sampah di TPA yang diangkut dengan mobil dari TPS ke TPA,di TPA masih melakukan proses menggunakan cara menggali kolam kemudian apabila sudah terisi penuh maka kolam tersebut di timbun karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai masih menggunakan sifat *countrolingfil* yang mengandalkan tenaga SDM seperti pemulung buat mengambil sampah yang bisa di daur ulang.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa pemrosesan akhir sampah di TPA cukup baik. Namun lebih baik lagi sampah itu di

olah menjadi hal-hal yang bermanfaat seperti menjadikan aspal maupun bahan bakar atau pupuk buat tanaman sehingga dapat mengurangi sampah di TPS maupun di TPA.

**b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.**

Suatu usaha dari Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah di Kota Dumai agar tidak ada lagi penumpukan sampah di TPS.

Selanjutnya penulis mewawancarai informan mengenai penyediaan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS). Menurut Arief Saputra.ST mengatakan:

*“pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai hanya menyediakan TPS di beberapa titik disiapkan, memang secara kebutuhan kurang namun pihak Dinas mengupayakan untuk sampah di masyarakat TPS disediakan di setiap titik kelurahan maupun kecamatan”.* (4 maret 2021)

Menurut Bapak Ketua Rukun Tetangga Suwardi mengatakan:

*“belum cukup bagus dalam penyediaan TPS di kelurahan”.* (6 maret 2021)

Lalu dirasa belum cukup penulis mendapatkan jawaban, penulis kembali mewawancarai Petugas Buruh Angkut Sampah.

Menurut Bapak Budi mengatakan:

*“sudah cukup bagus dalam penyediaan TPS di Kota Dumai, Karena jauh dari permukiman warga agar tidak mengganggu pengguna jalan”* (8 maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyediaan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) pihak Dinas hanya menyediakan di beberapa titik yang sudah ditentukan, namun masih kurang dalam

kebutuhan buat menampung sampah di Kota Dumai. Pihak Dinas berusaha buat menyediakan TPS disetiap kelurahan agar sampah tidak berserakan dan penumpukan dijalan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan,penulis menemukan bahwa TPS di setiap kelurahan memang mengalami kekurangan sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan bahkan membuangnya di sungai maupun saluran irigasi yang menyebabkan tersumbat dan terjadi banjir.

Lalu penulis melanjutkan wawancara mengenai materi tentang penyediaan pengangkut sampah di TPS

Menurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan:

*“setiap kelurahan ada penyediaan armada caisar untuk operasional disetiap kelurahan untuk jemput sampah,kemudian dibawa ke Dinas buat laporan lalu dibawa ke TPA. Armada buat kelurahan mengalami kekurangan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Pihak Dinas setiap tahun ada sesalu mengusulkan penambahan armada dumtruk/amrol maupun caisar tetap selalu usulkan ke BAPEDA.”(4 maret 2021)*

Kemudian menurut Bapak Suwardi mengatakan:

*“belum cukup untuk seluruh Kota Dumai, masyarakat masih banyak buang sampah sembarangan dipinggir jalan”(6 maret 2021)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Petugas Buruh Angkut Sampah agar bisa mendapatkan informasi berikutnya

Menurut Bapak budi mengatakan:

*“sudah cukup,apabila mau menabab armada maka lebih baik lagi agar lebih efektif dalam pengambilan sampah”(8 maret 2021)*



Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyediaan armada angkut sampah di Kota Dumai armada angkut sampah memang mengalami kekurangan untuk setiap kelurahan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi,tetapi setiap tahun selalu ada pengusulan kepada BAPEDA buat penambahan armada angkut sampah agar kinerja lebih efektif dalam pengambilan sampah di TPS.

Selanjutnya peneliti mewawancara mengenai sarana dan prasarana dalam pengelolaan atau pengangkutan sampah

Meenurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan:

*“di dumai sempat terbangun bank sampah,karena pengelolaa dan seperti karangtaruna kurang bergerak dibidang itu jadi agak sedikit terkendala,padahal sudah mengusahakan lebih maksimal lagi dalam pengelolaan sampah.”*(4 maret 2021)

Selanjutnya menurut Bapak Budi mengatakan:

*“sudah cukup dalam pengelolaan sampah,apabila ada kendala kerusakan pada armada angkut sampah mereka melakukan penukaran armada yang sebelumnya sudah selesai di gunakan”*(8 maret 2021)

berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam pengelolaan ataupun pengangkutan sampah dikota Dumai,bagian sarana armadanya sudah mencukupi untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA,dibagian pengelolaan sampah masih kurang karena masih mengandalkan pemulung untuk mengelola sampah yang berada di TPA.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa sarana armada maupun TPS di kota dumai masih kurang karena jauh penempatan



nya, kalau bagian pengelolaannya kota Dumai masih mengandalkan penggilangan, penggalan dan penimbunan sampah agar tidak menumpuk di TPA dan tersusun rapi sampah yang sudah di kelola.

**c. Penempatan Lokasi Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.**

Lokasi penempatan TPS serta TPA suatu kebijakan Dinas Lingkungan Hidup agar jauh dari lingkungan padat penduduk supaya tidak mencemari lingkungannya. Selanjutnya penulis mewawancarai informan mengenai tempat penempatan TPS Kota Dumai yang strategis.

Menurut Bapak Arief Saputra, ST mengatakan:

*“memang selalu memilih tempat jauh dari permukiman, kadang sampah ini ada yang basah mengakibatkan aroma yang tidak sedap, dengan memilih lahan kosong yang jauh dari lingkungan padat penduduk dan memilih tempat yang strategis”* (4 maret 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Petugas Buruh Angkut Sampah jawaban tidak jauh berbeda yang diungkapkan sebelumnya, menurut Bapak Budi mengatakan:

*“sudah, karena jauh dari lingkungan masyarakat dalam penempatannya”* (8 maret 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ketua Rukun Tetangga (RT) menurut Bapak Suwardi mengatakan:

*“belum strategis, karena sampah masih berserakan dipinggir jalan”* (6 maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penempatan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan

akhir(TPA) ada yang mengatakan sudah strategis dalam penempatannya dan ada juga yang mengatakan belum strategis dengan alasan sampah masih berserakan dipinggir jalan karena TPS jauh dari jangkauan warga.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa penempatan tempat penampungan sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan semaksimal mungkin dalam penempatannya agar jauh dari permukiman warga sehingga tidak merusak lingkungan warga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan mengenai pengelolaan sampah di TPA yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Menurut Bapak Arief Saputra. ST mengatakan:

*“pihak Dinas melakukan pengelolaan melakukan Sumber Daya Manusia yaitu pemulung, masih bersifat controlling, karena tidak ada bank sampah, dan pemulung pun melakukan itu untuk mencari penghasilan sehingga membantu ekonomi pemulung.”* (4 maret 2021)

Lalu dirasa belum cukup penulis mendapatkan informasi jawaban, penulis kembali mewawancarai Petugas Buruh Angkut Sampah di Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut Bapak Budi mengatakan:

*“sudah, karena pengelolaan di TPA menggunakan alat berat untuk penggilingan pengerukan dan penimbunan sampah di TPA agar sampah tidak melebar kelingkungan masyarakat agar tidak tercemar lingkungannya dan sampah itu tidak menumpuk semakin banyak.”* (8 maret 2021)

Menurut Ketua Rukun Tetangga Bapak Suwardi mengatakan:

*“belum ada pengelolaan, karena belum mencukupi dana buat pengelolaan sampah.”* (6 maret 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan kesimpulan dari wawancara diatas maka dengan adanya pengelolaan yang mengandalkan sumber daya manusia hingga melakukan pengerukan, penggilingan serta penimbunan yang dilakukan pada petugas yang berada di TPA dan juga program Dinas Lingkungan Hidup itu sudah maksimal dalam pengurangan sampah di Kota Dumai.

Lalu penulis juga melanjutkan wawancara mengenai tentang bentuk pengelolaan sampah di TPA

Menurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan

*“sama seperti bersifat controllingfil mengandalkan SDM dan melakukan pengerukan serta penimbunan sampah yang berada di TPA”*.(4 maret 2021)

Selanjutnya menurut Bapak Budi mengatakan:

*“memakai alat berat agar sampah tidak merusak lingkungan,karena pengelolaan di TPA menggunakan alat berat seperti beko,umroll dan dumtruk buat alat bantu untuk mengelola sampah dikeruk lalu digiling dan melakukan penimbunan agar sampah itu tidak menumpuk.”* (8 maret 2021)

Selanjutnya menurut Ketua Rukun Tetangga tidak jauh berbeda jawaban yang diungkapkan oleh Bapak Suwardi mengatakan:

*“melakukan pengerukan dan penimbunan terhadap sampah”*.(6 maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan program pengelolaan sampah dengan maksimal dengan cara melakukan pemberdayaan SDM serta dengan cara melakukan pengerukan, penggilingan dan penimbunan sampah agar tidak menumpuk di TPA dan sampahnya tidak merusak lingkungan sekitar masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik. Namun sampah masih saja menumpuk di TPS yang mengakibatkan saluran irigasi tersumbat dan aroma sampah dapat mengganggu pengguna jalan dan juga sampah masih berserak dipinggir jalan.

#### **d. Hambatan-Hambatan Pengelolaan Sampah di Kota Dumai**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi hambatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Arief Saputra.ST mengatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu

*“seperti kekurangan armada pelayana umum sehingga sampah yang akan dikelola terhambat kadang ada mobil hari ini jalan,besoknya rusak jadi sampah yang seharusnya diangkat dan dikelola sama pemulung di TPA tidak teratasi karena ada satu/ dua mobil tidak bisa diakses/rusak maka ditunda untuk servis sampai waktu 2/3 hari maka pengelola sampah di TPA jadi terhambat.”*

2. Menurut bapak Arief Saputra.ST mengatakan faktor penghambat berikutnya yaitu:

*“semenjak COVID ini kita ada pemangkasan anggaran langsung dari pusat, jadi untuk anggaran BBM ini dipotong,biasanya armada angkut sampah ini mengambil sampah di lokasi terjauh lagi karena pemotongan anggaran itu.”*

3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sementara (TPS) agar sampah tidak berserak dipinggir jalan dan di saluran irigasi yang menyebabkan bencana banjir.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai seluruhnya sudah berjalan secara optimal, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan sampah.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai tentang kekurangan armada pelayanan angkutan sampah, adanya pemotongan anggaran selama pandemi covid-19.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka penulis memberikan saran atau masukan-masukan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Dumai sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat melakukan koordinasi dengan petugas buruh angkut sampah dalam komunikasinya agar datang tepat waktu ke TPS dalam pengambilan sampah dan pembuangan sampah ke TPA
2. Disarankan menyediakan cadangan mobil armada angkut sampah, apabila mobil armada yang sedang beroperasi mengalami kerusakan, bisa pakai mobil cadangan, tidak harus menunggu mobil berikutnya baru bisa kerja.
3. Disarankan segera membuat program pengelolaan sampah yang bisa cepat mengurai sampah-sampah di TPA agar tidak menumpuk lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sastrawijaya, Tresna. A., 2009. Pencemaran Lingkungan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.
- Taliziduhu, Ndraha, 1997, Ilmu Pemerintahan (Kybernologi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyid, M.Ryass. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Yasraf Watampone.
- Winarno, Budi,2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta:Media Press.
- Jones, Charles O, 1970, *An Introduction to The Study of Publik Policy*, Belmont CA: Wadsworth.
- Soejono Soekanto, 2009. peranan sosiologi. Suatu pengantar. Edisi Baru: Rajawali Pers Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru.
- Prof. DR. H. Inu Kencana Syafii, M.Si,2013. Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi Kedua, Mandar Maju, Bandung
- Prof. DR. H. A. Brasz. *Inieding Tot De Bestuurs Wetenschap*. Vuga Boekerij,1975, halaman 1.

Drs. Musanef. Sistem Pemerintahan Indonesia. Gunung Agung Jakarta, 1985, halaman 7-8.

Prof. C.F. Strong. Modern Political Constitution. Sidgwich & Jakson Ltd. London, 1960, halaman 6.

Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Bahar. Yul, H. 1986, Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah,. Jakarta : PT Waca Utama Pramaesti.

Supriyanto, Muhsin. 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Hamidi. Lutfi. 2010. *Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan. Melayu SP, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, jakarta : Bumi Aksara.

Hasibuan. Malayu. SP, 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zainal, Nining Haslinda. 2008. analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. Makassar: FISIPOL.

Sumardi, I Nyoman, 2010. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia Bogor, Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

Ekky Anant Sahara “Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pelaksanaan Pengelola Sampah Di Kabupaten Sidoarjo, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2013.



Hildawati, “evaluasi kebijakan pengelolaan sampah padakecamatan di kota dumai”, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, Volume 5, Nomor 1, 2018.

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si “Hakekat Organisasi Perangkat Daerah”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol, III Nomor 2 Oktober 2017

Nia Karniawati, “Hakekat Ilmu Pemerintahan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 1 No. 2, Oktober 2015.

Sylvina Rusadi, Made Devi Wedayanti, “Strategi *City Branding* Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata”, Jurnal Wedana, Volume V No 2 Oktober 2019

Astellia Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume. 3 Nomor 3, 2015.

### **Dokumentasi**

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang “Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Adalah Dinas Lingkungan Hidup”.

Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang “pemerintahan daerah”

Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang “Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.